

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Pandangan akan pentingnya pendidikan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas merupakan suatu hal yang bersifat global. Hal ini merujuk pada pandangan yang berlaku di seluruh belahan dunia yang mempercayai bahwa investasi dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan faktor penting bagi sebuah negara agar dapat bersaing di era globalisasi. Pandangan global ini tercermin dari pengakuan berbagai pemerintah di dunia akan pentingnya fungsi dan peran Pendidikan Anak Usia Dini baik bagi anak usia dini maupun bangsa sebagaimana pendidikan anak usia dini tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dimana disebutkan bahwa Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke pengembangan, pengasuhan, dan pendidikan prasekolah anak usia dini yang berkualitas sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar (Blatchford, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, perumusan kebijakan anak usia dini telah berkembang pesat di semua negara OECD. Menurut Bennet dan Neuman (2004) pihak berwenang semakin kencang dalam merancang strategi untuk meningkatkan kualitas, perekrutan, pelatihan, dan dukungan staf (Bennett at al, 2004).

Di Indonesia, hal ini tercermin sebagaimana diterbitkannya kebijakan PAUD Holistik Integratif pada Perpres Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, dimana diharapkan seluruh pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi sehingga dicapai tujuan yaitu terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berahlaq mulia. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, mencoba menginisiasi Kebijakan PAUD Holistik Integratif khas Jawa Barat sehingga dapat diimplementasikan secara baik ke seluruh PAUD di Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, tentu kolaborasi menjadi kata kunci untuk mewujudkan fungsi dan tujuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF melalui Kelompok Kerja Bunda PAUD. Salah satu strategi kolaborasi yang dapat diimplementasikan dalam hal ini adalah Kolaborasi Pentahelix. Kolaborasi Penta Helix, yang merupakan bentuk pengembangan dari model Triple Helix yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), merupakan desain integrasi antara lima pemain kunci, yang saling terkoordinasi dan berkolaborasi. Oleh karena itu, Penta Helix merupakan perluasan dari model Triple Helix dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan inovasi tersebut (Lindmark dan Markus, 2009; Lindmark, Sturesson & Roos, 2009: 24). Sinergi ABCGM yaitu Akademisi (*Academy*), Bisnis (*Business*), Komunitas (*Community*), Pemerintah (*Government*), dan Media menjadi kata kunci penting dalam sinergi Pentahelix (Fitriani dkk, 2019). Dalam kaitannya dengan PAUD, pemangku kepentingan yang dipandang memiliki peran strategis untuk mengkolaborasikannya dan menciptakan layanan PAUD berkualitas holistik integratif melalui strategi Penta Helix adalah “Bunda PAUD” yang dibantu oleh Kelompok Kerja Bunda PAUD.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara masif membentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD di seluruh Provinsi, salah satunya Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat. Sejak 22 Juli 2020, telah terbentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat yang beranggotakan berbagai unsur baik perangkat daerah, organisasi mitra, akademisi, juga praktisi. Kelompok kerja ini selanjutnya memperoleh dana dari berbagai tingkat pemerintahan baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa di Provinsi Jawa Barat Pembangunan PAUD masih menjadi Pekerjaan Rumah yang perlu diselesaikan. Berdasarkan data dari BPS (2020) bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat hingga tahun 2019 baru mencapai angka 71,30 atau meningkat dari capaian 2018 yaitu 70,69. Meski begitu, capaian ini masih di bawah

rata-rata nasional yaitu 71,39 (2019) (BPS, 2020). Sedangkan jika kita menilik Angka Partisipasi Kasar di Jawa Barat, Berdasarkan data dari Kemdikbud (2023), pada tahun ajaran 2022/2023 Provinsi Jawa Barat masih tertinggal dibanding provinsi lain di Pulau Jawa yaitu 45,68%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah 55,54%, Provinsi Jawa Timur 69,08%. Begitu pula akreditasi PAUD di Jawa Barat, 68,1% PAUD di Jawa Barat pada Tahun 2019 belum terakreditasi (Kemdikbud et al., 2023).

Kualitas dan kuantitas pendidik PAUD di Provinsi Jawa Barat sebagaimana data Kemdikbud (2023), secara keseluruhan jumlah pendidik di PAUD mencapai 38.218 pendidik, terdiri dari 1.005 pendidik di PAUD Negeri, dan 37.213 pendidik di PAUD Swasta. Adapun yang statusnya sebagai PNS berjumlah 3.324 pendidik dan non ASN berjumlah 34.894 pendidik. Dari sisi latar belakang pendidikan, 13.304 pendidik (34,81%) merupakan S1 PAUD, 4.678 pendidik (12,24%) merupakan S1 non PAUD, 726 pendidik (1,9%) memiliki ijazah lebih tinggi dari S1 dan 19.510 pendidik (51,04%) memiliki ijazah lebih rendah dari S1.

Lebih khusus lagi, jika melihat data kualitas dan kuantitas yang terdapat di Kota Bandung, secara umum Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kota Bandung pada tahun ajaran 2022/2023 baru mencapai 36,04 berada dibawah rerata Provinsi Jawa Barat dan nasional (Kemdikbud et al., 2023). Untuk jumlah pendidik PAUD di Kota Bandung mencapai 2.541 pendidik, atau sebesar 6,6% dari keseluruhan jumlah pendidik PAUD di Provinsi Jawa Barat. Jika melihat dari status kepegawaian, pendidik PNS berjumlah 259 pendidik dan non ASN berjumlah 2.282 pendidik. Dari sisi latar belakang pendidikan, 1.151 pendidik (45,29%) merupakan S1 PAUD, 858 pendidik (33,76%) merupakan S1 non PAUD, dan 532 pendidik (20,93%) memiliki ijazah lebih rendah dari S1. Jika diperhatikan, terdapat 1.390 pendidik atau 54,7% memiliki ijazah kurang dai S1 maupun memiliki ijazah S1 non PAUD, artinya mendominasi jumlah pendidik PAUD Kota Bandung yang memerlukan peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi pendidik tentu menjadi perhatian yang sangat besar menilik dari data tersebut. Tentu

dalam penyelesaiannya diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/kota, perguruan tinggi, juga masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan PAUD. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari elemen lain. Diketahui bahwa kewenangan pemerintah negara bagian primer hanya terhadap pendidikan menengah yaitu SMPN 6 dan SMK, dan pendidikan luar biasa yaitu TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB meningkat. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar juga menjadi bagian dari Peningkatan Indeks Pendidikan yang melekat pada Indikator Kinerja Utama Gubernur selaku Kepala Daerah pada tingkat Provinsi. Untuk itu terdapatnya organisasi diluar pemerintahan yang masih dalam koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi menjadi hal yang sangat krusial.

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab./Kota
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan Pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini <u>dan Pendidikan nonformal</u>
2	Kurikulum	Penetapan <u>kurikulum nasional</u> pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan local Pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan <u>tinggi, pendidikan menengah</u> , pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	-	-
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian <u>formasi pendidik</u> , pemindahan pendidik, dan	Pemindahan pendidik <u>dan tenaga kependidikan</u> lintas Daerah	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah <u>Kab./Kota</u>
		pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	kabupaten /kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan <u>satuan pendidikan</u> asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) <u>Daerah provinsi</u> .	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tabel 1.1. Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Pendidikan

Hadirnya Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 dapat membantu menyelesaikan hal tersebut melalui pelaksanaan program yang dapat melewati *barrier-barrier* koordinasi yang menjadi rintangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendukung pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi sebagai organisasi baru, tentu memerlukan strategi kolaborasi yang matang agar mampu mendukung pengembangan PAUD di Provinsi Jawa Barat. Salah satu strategi kolaborasi yang dapat digunakan adalah strategi kolaborasi pentahelix.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini secara khusus membahas tentang bagaimana strategi kolaborasi Penta Helix diterapkan pada Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat khususnya berkenaan dengan meningkatnya kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, penelitian ini berfokus pada kolaborasi antara Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dengan perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Bandung, dan *International Women University* khususnya dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung, oleh karena itu memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan perencanaan peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung?
2. Bagaimana ruang lingkup kolaborasi yang dilakukan Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dengan perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung?
3. Bagaimana bentuk strategi Kolaborasi Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung?
4. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi kolaborasi Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung?
5. Bagaimana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi strategi kolaborasi Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dalam

peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Tergambarnya pemahaman tentang peran Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan perencanaan peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung;
2. Tergambarnya ruang lingkup kolaborasi yang dilakukan Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dengan perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung;
3. Tergambarnya bentuk strategi Kolaborasi Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung;
4. Tergambarnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi kolaborasi Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung;
5. Tergambarnya pemahaman mengenai bentuk tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi strategi kolaborasi Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Untuk Pemerintah: didapatkannya strategi Kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui optimalisasi peran Kelompok Kerja Bunda PAUD

Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung;

2. Untuk Bunda PAUD dan Kelompok Kerja Bunda PAUD: didapatkannya strategi Kolaborasi Penta Helix pada Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dalam optimalisasi peran setiap unsur internal Kelompok Kerja yang tergabung dalam peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung;
3. Untuk Pihak Sekolah: memperoleh masukan dalam hal peningkatan kompetensi Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung di setiap sekolah dengan dukungan dari setiap unsur di masing-masing wilayah, yang dijumpai oleh Kelompok Kerja Bunda PAUD;
4. Untuk Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini: memperoleh pemahaman dalam peningkatan kompetensi masing-masing Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung.

1.5. STRUKTUR TESIS

Struktur organisasi dari penulisan proposal ini terdiri dari 5 (lima)

Bab. Adapun penulisan tiap babnya adalah:

1. Bab I berisi tentang uraian pendahuluan, yang di dalamnya berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, perumusan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur tesis dalam penelitian ini.
2. Bab II berisi tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD di Kota Bandung.
3. Bab III mengenai penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, yang meliputi lokasi dan subyek penelitian, desain dan metode penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
4. Bab IV tentang penyajian hasil data penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian sampai kepada implikasi dan rekomendasi, menyajikan

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian

5. Bab V tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian serta saran dan rekomendasi yang dapat ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, dan kepada peneliti berikutnya yang beminat melakukan penelitian selanjutnya.